



Radar Bali

**Reklamasi
di Mata
Bendesa**



Bendesa Adat	Sikap	Keterangan
Tanjung Benoa	Menolak	Final
Kedonganan	Menolak	Belum paruman
Kelan	Menolak	Final
Bualu	Abu-abu	Ngaku tak punya kapasitas
Kampial	Netral	Kalau sesuai Amdal, silakan
Kuta	Belum Ada	Tunggu aspirasi dari bawah
Kepaon	Belum Ada	
Sidakarya	Belum Ada	

GRAFIS: DYAH FEDIAWATURADAR BALI

Bendesa Adat Silang Pendapat Terkait Reklamasi Teluk Benoa

BADUNG - Terbongkarnya rencana reklamasi Teluk Benoa yang digagas taipan Tommy Winata melalui bendera PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) sudah berlangsung hampir dua tahun. Antara yang pro dan kontra kerap bergantian melakukan demonstrasi. Sebetulnya, bagaimana sikap sejumlah bendesa adat atau desa adat di sekitar Teluk Benoa?

Beberapa bendesa adat ketika dikonfirmasi *Jawa Pos Radar Bali* setidaknya bersikap beragam. Ada yang menolak keras, sebagian lagi mengaku netral. Yang menolak keras di antaranya adalah Bendesa Adat Tanjung Benoa Made Wijaya, Bendesa Adat Kedonganan Putu Jata, dan Bendesa Adat Kelan Made Sugita. Sedangkan beberapa bendesa adat lainnya mengaku tidak mendukung, tapi juga tidak menolak alias netral

▶ Baca **Bendesa...** Hal 35

Edisi : Rabu, 13 Mei 2018
 Hal : 21



Sambungan...

Paruman Ikuti Aspirasi Warga

■ BENDESA...

Sambungan dari hal 21

"Tiyang sudah menandatangani pernyataan sikap, tiyang sudah kirim ke Menteri Kelautan dan Komisi IV DPR RI. Dengan tegas dan konsisten menolak reklamasi Teluk Benoa, atau direvitalisasi apapun," tandas Made Wijaya kepada *Jawa Pos Radar Bali* kemarin (12/5).

Yonda, sapaan Wijaya, mengaku banyak alasan menolak reklamasi Teluk Benoa.

Yang menarik, meski sudah terang-terangan menolak, Wijaya mengaku masih terus dirayu dan dilobi oleh pihak investor. "Investor terus merayu dengan berbagai cara, tapi saya tetap komitmen menolak. Mudah-mudahan Tuhan melindungi tidak sampai terpengaruh sampai kapan pun," tukasnya.

Sementara Putu Puja, bendesa adat Kedonganan juga tegas menolak. Puja menandakan, sampai saat ini krama Desa Adat Kedonganan belum mengadakan paruman resmi merespons reklamasi. Namun, mayoritas prajuru adat dan sesepuh desa adat menyatakan menolak rencana reklamasi. "Kami sebenarnya sibuk karena menyiapkan upacara di *pura desa*, kami tidak ada waktu mengurus reklamasi. Tapi, sampai saat ini kami tetap menolak reklamasi," beber Puja.

Hal senada diungkapkan Bendesa Adat Kelan Made Sugita. Dia mengatakan, pihaknya tidak menemukan alasan menerima atau menyetujui rencana reklamasi. Menurut Sugita, reklamasi lebih banyak merugikan. "Keputusan Desa Adat Kelan menolak reklamasi tidak bisa diganggu dan digugat. Kami tetap menolak," ujar Sugita dengan semangat.

Sikap berbeda ditunjukkan Bendesa Adat Bualu, Nusa Dua, Made Reta. Saat ditanya sikap menolak atau menyetujui reklamasi, Reta tidak memberikan jawaban jelas. Dia berdalih, pihaknya tidak mempunyai kapasitas menyetujui atau menolak rencana reklamasi. "Biarkan

masyarakat berwacana, saya tidak punya kapasitas menyetujui atau menolak. Yang menyetujui *kan* pemerintah," ucap Reta.

Didesak apakah itu artinya dia mendukung reklamasi, Reta kembali tidak memberikan jawaban secara jelas. Kalaupun, pihaknya tidak mau ikut terlibat dalam reklamasi. Reta mengakui pernah berkomunikasi dengan investor.

"Tapi, saya *kan* bukan kapasitas menyetujui," kelitnya lagi. Kalau sikap pribadi sebagai bendesa adat bagaimana? "Ya, kita kembalikan kepada masyarakat," jawab politisi Demokrat itu.

Bendesa Adat Kampial Wayan Badra menyatakan, secara prinsip tidak ke-

beratan dengan rencana reklamasi, asal sesuai dengan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Meski demikian, Badra menolak jika dirinya disebut mendukung reklamasi. Menurutnya, pihaknya tidak membela investor dan menyetujui reklamasi. Namun, dirinya hanya berusaha netral dalam bersikap.

"Pada prinsipnya saya netral, tidak memihak siapa pun," terangnya.

Di sisi lain, Bendesa Adat Kuta Wayan Swarsa mengaku belum menentukan sikap secara kelembagaan. Pihaknya masih terus mengikuti perkembangan pro dan kontra reklamasi. "Kalau keputusan lembaga adat belum ada. Keputusan adat ini harus melalui *paruman*, sementara *paruman* harus ada aspirasi dari bawah," jelas Swarsa.

Sementara itu, bendesa adat dari Denpasar yang wilayahnya masih seputaran Teluk Benoa juga bersikap berbeda. Bendesa Adat Kapaon Ida Bagus Suteja mengungkapkan, pihaknya belum berani berkomentar masalah tersebut, apalagi saat ini belum jelas persoalannya di mana. "Kami saat ini belum bersikap," terangnya.

Pun demikian dengan Bendesa Adat Sidakarya I Nyoman Sudarma, saat dihubungi tidak bersedia membuat pernyataan mengenai reklamasi Teluk Benoa. "Nanti saja *ya*, saya sedang istirahat," tutupnya singkat. (san/hen/yor)

Edisi : Rabu, 13 Mei 2015

Hal : 21



Radar Bali

TAMBANG

Satpol PP Tutup Lima Galian C

AMLAPURA - Satpol PP Karangasem, bersama dinas terkait seperti Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), KP2T (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu), dan Bagian Ekonomi Pemkab Karangasem, melakukan sidak galian C di wilayah Kecamatan Kubu, Karangasem, Selasa (12/5). Hasilnya, sebanyak lima lokasi penambangan batu ditutup. Kelimanya diduga tidak mengantongi izin. "Dari lima itu, hanya satu yang kami temui pemiliknya, yaitu galian di Dusun Bukit, Desa Sukadana," kata Kasat Pol PP Karangasem, Iwan Suparta.

Sisanya, pemilik masing-masing galian C tidak ada di tempat. Keempat pemilik galian C itu, diduga sudah mengetahui akan didatangi petugas. Mereka juga dituding kucing-kucingan dengan petugas. "Kami curiga, kegiatan ini (sidak) bocor," tegas Iwan Suparta.

Meski empat pemilik galian C terindikasi bodong tak ada di tempat, pihaknya tetap menyetop aktivitas penambangan itu. Kelimanya, juga dipanggil ke Kantor Satpol PP. Pasalnya, selain diduga bodong, kelima lokasi galian C itu, juga tidak membayar pajak. Beda halnya dengan galian C bodong lainnya. Tidak mengantongi izin penambangan, tapi bayar pajak.

Lima usaha galian C itu, dipastikan tidak membayar pajak, karena saat tim melakukan sidak, tidak terlihat ada faktur penjualan, sebagai bukti membayar pajak. "Mereka tidak memiliki faktur penjualan. Artinya tidak kena pajak, sehingga terjadi kebocoran PAD. (Pendapatan Asli Daerah)," tandas Iwan Suparta.

Sehari sebelumnya, Sat Pol PP Karangasem, juga melakukan razia truk galian C di pertigaan Biaung, Kecamatan Selat, Karangasem. Sebanyak sembilan truk, terjaring karena membawa faktur pajak, tertanggal sehari sebelumnya. Semestinya, menurut Iwan, tanggal faktur berdasarkan tanggal pengambilan material galian. Sopir beralasan, faktur pajak itu, didapat dari paguyuban. Karena menduga ada permainan sopir dengan oknum petugas pungut pajak, Satpol PP berusaha mengonfirmasi. Hasilnya, paguyuban berdalih kelebihan mengisi stempel faktur. (wan/gup)

Edisi : Rabu, 13 Mei 2015

Hal : 25